

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara dengan populasi yang sangat besar, menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kesejahteraan bagi penduduknya. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan keadilan sosial, kesejahteraan, dan kemakmuran bagi rakyat. Untuk mencapai tujuan ini, peran aktif pemerintah sangat penting, disertai dengan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan. Salah satu tantangan utama dalam menciptakan kesejahteraan sosial adalah masalah kemiskinan, yang mencerminkan ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk mencapai standar hidup yang layak.

Kondisi kemiskinan, seperti kekurangan tempat tinggal dan pangan, tidak hanya menurunkan kualitas hidup tetapi juga dapat menyebabkan masalah kesehatan serius dan menyebarkan penyakit. Penanggulangan kemiskinan membutuhkan pendekatan yang komprehensif, mengingat sifatnya yang kompleks dan multidimensi. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan tidak hanya bersifat sementara, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya untuk mengurangi dan akhirnya menghapuskan kemiskinan.

Meskipun pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai indikator utama untuk menilai tingkat kemakmuran suatu daerah, bangsa, atau negara, kenyataannya kemiskinan masih tetap ada bahkan di tengah kemakmuran (Rustan, 2019). Faktor yang mempengaruhi kemiskinan melibatkan beberapa faktor yang menyebabkan

kondisi tersebut, termasuk modal sumber daya manusia (human capital), modal fisik produktif (*physical productive*), status pekerjaan, dan karakteristik desa.

Secara umum, tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada anggota keluarga dapat meningkatkan kemungkinan keluarga bekerja di sektor formal dengan pendapatan yang lebih tinggi. Sebaliknya, rendahnya mutu dan kualitas kehidupan penduduk yang hidup dalam kemiskinan dapat mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan, yang langsung berdampak pada penurunan produktivitas penduduk tersebut. Kemiskinan diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, seperti pangan, sandang, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Kemiskinan merupakan fenomena yang mendunia. Karena itulah pemimpin-pemimpin di dunia mempersiapkan berbagai konsep dalam memberantas kemiskinan (Saputra, Panorama 2022).

Masyarakat miskin merupakan keluarga dengan serba kekurangan dalam segi apapun. Pemerintah dengan sigap berusaha menanggulangi kemiskinan dengan memberi kebijakan. Kemiskinan tidak terjadi begitu saja melainkan bisa dilihat dari beberapa aspek, misalnya ketidakmampuan dalam memenuhi pendapatan sehingga akan mengakibatkan kurangnya pemenuhan dasar dalam keluarga. Kemudian adapula yang disebabkan adanya ketimpangan di wilayah tempat tinggal, kebiasaan tidak produktif hingga disebabkan oleh sumber daya manusia yang rendah.

Dalam Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan (PKH). Semua terkait bantuan PKH diatur dan dideklarasikan oleh Menteri Sosial bahwa program keluarga harapan memberikan syarat bantuan sosial kepada keluarga miskin dan dicatat dalam data gabungan program. Untuk

pengelolaan masyarakat miskin, yang dituangkan dalam informasi kesejahteraan masyarakat sesuai dengan keputusan sebagai keluarga penerima PKH. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa yang dinamakan Keluarga Penerima Pelayanan yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat adalah keluarga penerima bantuan sosial PKH yang telah memenuhi syarat dan diterapkan dalam keputusan.

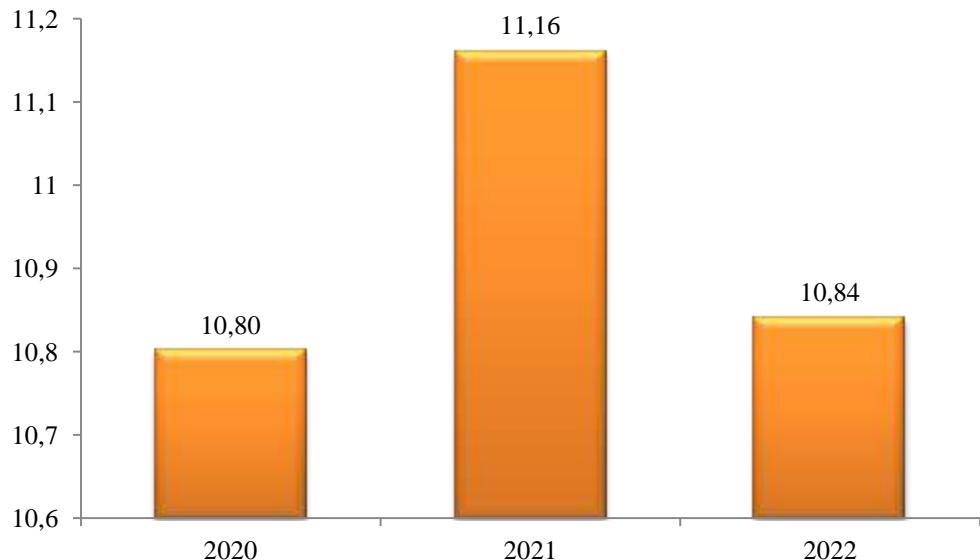
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 dalam Pasal 3 ayat 4 tentang susunan perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan di bidang sosial. Salah satu peran utamanya adalah menjalankan Program Keluarga Harapan (PKH), yaitu program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan.

Berdasarkan observasi awal melalui pengamatan langsung di lapangan, penerima PKH di Blang Mangat telah mengalami peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, terutama untuk anak-anak dan ibu hamil. Bantuan tunai yang diberikan melalui PKH terbukti membantu meringankan beban ekonomi keluarga miskin, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar dengan lebih baik (Observasi Awal, Tanggal 21 April 2024).

Kemudian penulis melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang menerima bantuan PKH di Kecamatan Blang Mangat yaitu Ibu Fatimah yang mengatakan bahwa ia merasa bahwa PKH telah memberikan dampak positif bagi keluarganya, khususnya dalam membantu memenuhi kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak-anaknya, (Wawancara awal, Tanggal 21 April 2024)

Meskipun demikian, masih ditemukan tantangan dalam hal distribusi bantuan yang belum sepenuhnya merata serta pemanfaatan bantuan yang belum optimal di beberapa keluarga. Secara keseluruhan, PKH di Kecamatan Blang Mangat memiliki potensi besar untuk menurunkan tingkat kemiskinan, namun keberhasilannya memerlukan monitoring yang berkelanjutan dan dukungan tambahan dalam pemberdayaan ekonomi bagi keluarga penerima manfaat. Diketahui kemiskinan di Kota Lhokseumawe 2020-2022 telah mencapai angka ribuan sejak tahun 2020 sampai 2022, berikut grafik tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe:

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan di Kota Lhokseumawe



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) kota Lhokseumawe, 2023

Berdasarkan grafik 1.1. tersebut dapat diketahui bahwa tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe dari tahun 2020 s.d 2022 mengalami kenaikan khususnya di tahun 2021 tingkat kemiskinan mencapai 11,16%. Dari grafik kemiskinan tersebut kemiskinan masih menjadi permasalahan yang serius di Kota Lhokseumawe karena kemiskinan terjadi juga disebabkan oleh beberapa faktor. Kemunculan kemiskinan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak terlepas dari peran

pemerintah dalam rencana kerjanya untuk mengatasi dan mengentaskan kemiskinan.

Dinas Sosial memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan dan mengelola PKH di Aceh, termasuk melakukan pendataan, verifikasi, serta penyaluran bantuan kepada keluarga yang memenuhi kriteria penerima manfaat. Selain itu, Dinas Sosial bertugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan PKH untuk memastikan program ini berjalan efektif serta mencapai tujuan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin. Melalui program ini, Dinas Sosial juga memberikan pendampingan kepada penerima manfaat agar mereka dapat memaksimalkan bantuan yang diterima, sehingga kesejahteraan mereka secara bertahap dapat ditingkatkan. Peran ini menunjukkan bagaimana Dinas Sosial mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Aceh, sesuai dengan mandat yang diberikan oleh Qanun Aceh.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan sebuah inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di berbagai daerah, termasuk di Kota Lhokseumawe. Dalam implementasi dari Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Lhokseumawe. Program ini merupakan inovasi daerah Pemprov Aceh untuk Kota Lhokseumawe. Melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Lhokseumawe salah satu program yang diselaraskan dalam upaya pencapaian *Sustainable Development Goals* (SGDs) pada tujuan ke-1 ini adalah Program Keluarga Harapan (PKH) mengingat program ini merupakan program bantuan bersyarat yang diberikan kepada keluarga miskin yang terdaftar. Program ini merupakan suatu jaringan sosial untuk setiap penduduk masyarakat yang termasuk dalam golongan penduduk miskin dan merupakan program nyata dalam

membantu secara langsung masyarakat yang membutuhkan. PKH telah dilaksanakan di empat kecamatan di Kota Lhokseumawe.

Program PKH memberikan bantuan finansial kepada keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Masyarakat yang terlibat adalah penerima manfaat PKH merupakan keluarga miskin yang telah terdaftar dalam basis data yang ditetapkan oleh pemerintah. Program ini dilaksanakan secara berkala setiap bulan atau sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh pemerintah. PKH merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kota Lhokseumawe. Program ini berdampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe dapat diukur melalui berbagai indikator, salah satunya ialah penurunan angka kemiskinan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta perubahan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat penerima manfaat PKH. Dengan demikian, PKH berpotensi untuk memberikan kontribusi positif dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Kota Lhokseumawe.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan pengkajian lebih dalam tentang *“Pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe”*

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian adalah:

Apakah Program Keluarga Harapan (PKH) berpengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe ?

1.3 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini mengevaluasi sejauh mana implementasi PKH tepat sasaran dan berhasil meningkatkan kesejahteraan keluarga penerima manfaat (KPM) melalui akses lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan peningkatan ekonomi. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi pada penerima manfaat, seperti partisipasi aktif dalam kegiatan pendidikan anak dan pemeriksaan kesehatan rutin.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

Untuk menguji pengaruh Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak lain yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Menambah wawasan dan pengetahuan terutama tentang Pengaruh PKH Terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe yang menjadi salah satu referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai bahan untuk melatih ketajaman analisis terhadap kondisi riil di lapangan dengan disiplin ilmu manajemen khususnya tentang Pengaruh

PKH Terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

b. Bagi Pemerintah

Dapat dijadikan sebagai bahan masukan tentang pentingnya memasukkan terhadap Pengaruh PKH Terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe.

c. Bagi Masyarakat Umum

Dapat menambah referensi yang dapat dijadikan sebagai informasi untuk mengetahui Pengaruh PKH Terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe